INDONESIAN TREASURY REVIEW
JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

ANALISIS PENGARUH DANA DESA DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PER KABUPATEN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI INDONESIA DENGAN PEMBAGIAN WILAYAH SEBAGAI VARIABEL KONTROL

Tio Andri Prasetyo
Politeknik Keuangan Negara STAN
Agung Dinarjito
Politeknik Keuangan Negara STAN

agung.dinarjito@pknstan.ac.id

ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the effect of the Village Fund and Human Development Index on Regional Economy with Regional Distribution as a control variable. In conducting this research, panel data from secondary data is processed using quantitative methods. This study uses a total of 1716 data consisting of 429 cross sections of data with a time series within a period of 4 years. The method used for data analysis is Feasible General Least Square (FGLS) with the Panel-Corrected Standard Errors (PCSE) estimation coefficient using Eviews10 application program. The results of the study prove that the Village Fund and Human Development Index variable have a positive impact on Regional Economic Growth.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan Pembagian Wilayah sebagai variabel kontrol. Dalam melaksanakan penelitian ini, data panel berupa data sekunder digunakan. Penelitian ini menggunakan populasi sejumlah 1716 data yang terdiri dari 429 data *cross section* dengan *time series* dalam kurun waktu 4 tahun. Metode analisis data menggunakan *Feasible General Least Square* (FGLS) dengan koefisien estimasi *Panel-Corrected Standard Errors* (PCSE) dengan bantuan program aplikasi *Eviews10*. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengaruh positif signifikan variabel Dana Desa dan IPM pada kabupaten di Pulau Jawa lebih tinggi dibanding dengan di luar Pulau Jawa.

KATA KUNCI:
Economic Growth, Government Expenditure, Human Development Index, Public Financial Management, Village Fund

KLASIFIKASI JEL:
H72, O23, R11

CARA MENGUTIP:
Prasetyo, T., A. & Dinarjito, A. (2021). Analisis pengaruh dana desa dan indeks pembangunan manusia per kabupaten terhadap produk domestik regional bruto di indonesia dengan pembagian wilayah sebagai variabel kontrol. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(4), 375-391.

1. PENDAHULUAN

PENERAPAN DALAM PRAKTIK

1. Dana Desa memberikan pengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
2. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Pemerintah perlu membuat standar pertanggungjawaban Dana Desa dengan konsep *e-government* untuk memastikan ketepatan penggunaan Dana Desa.
4. Pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan terhadap perangkat desa untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa sejalan dengan prioritas pembangunan masing-masing desa.

1.1 Latar belakang

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap tata kelola keuangan desa. Desa yang dahulunya hanya menjalankan fungsi administrasi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah berubah menuju suatu entitas yang juga menjalankan fungsi penganggaran, penatausahaan aset, serta pelaporan kekayaan. Perubahan yang sangat signifikan ini telah sampai kepada tahun ketujuh dan total sebanyak 187 triliun Dana Desa tersalurkan sejak 2015 sampai dengan 2018. Pemerintah berkomitmen membangun Indonesia dari desa. Tabel 1 menunjukkan Dana Desa dari 2015 hingga 2018

Dengan lahirnya Undang-Undang Desa dan Dana Desa, pemerintah berharap hal itu menjadi modal berharga bagi terwujudnya pembangunan desa yang berkeadilan. Dura (2016) menyatakan bahwa alokasi dana, kebijakan, serta kelembagaan desa memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dydha (2017) juga mengemukakan hasil penelitiannya terhadap dampak dari Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur dan usaha memberdayakan masyarakat desa dengan kesimpulan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh positif dan memiliki perbandingan yang searah sebesar 87,7% terhadap usaha membangun infrastruktur desa dan memiliki pengaruh yang positif dan memiliki perbandingan yang searah sebesar 85% terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa berperan sebagai penunjang jalannya ekonomi pada pembangunan infastruktur, peningkatan usaha kecil menengah, pengelolaan bank sampah, dan pelatihan usaha ekonomi.

Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh Tim Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2017) yang berjudul "*Village Fund and Proverty Alleviation*" menunjukkan bahwa terdapat pendistribusian dana yang tidak merata antar kabupaten pada formula pengalokasian Dana Desa tahun 2016 (KOMPAK, 2017). Meutia & Liliana (2017) juga menemukan adanya pelaksanaan pembangunan di pedesaan yang tidak merata sehingga dalam pembangunan tidak ada *multiplier effect* yang didapat oleh masyarakat desa.

Dana yang diperuntukkan bagi desa sendiri sebenarnya sudah ada sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan nama Alokasi Dana Desa. Bedanya, jika Dana Desa berasal dari APBN, maka Alokasi Dana Desa berasal dari APBD. Dana Desa adalah transfer fiskal yang penting baik untuk pemerintah pusat dan daerah. Dari sudut pandang pemerintah pusat, itu merupakan petunjuk bahwa pemerintah pusat memiliki komitmen untuk ikut serta dalam pembangunan di desa sesuai dengan keunikan yang mereka miliki sehingga pada akhirnya mampu mengurangi ketimpangan antar desa.

Di sisi lain, Sutiyono et al. (2018) menemukan bahwa Dana Desa juga menjadi basis penghasilan utama desa dimana melebihi 50% penghasilan diperoleh dari Dana Desa. Dana Desa bertujuan antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, hingga meningkatkan produktivitas usaha. Saat ini Dana Desa yang semakin

Tabel 1. Dana Desa 2015 s.d. 2018

Tahun	Jumlah Desa	Jumlah Dana Desa per Desa dalam jutaan rupiah	Total Anggaran Dana Desa dalam Triliun
2015	74.093	283,3	20,67
2016	74.754	643,6	46,98
2017	74.910	800	60
2018	74.957	800,4	60

Sumber: Diolah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan, 2019)

meningkat diutamakan untuk ekspansi infrastruktur dan penguatan masyarakat. Target dari kegiatan pembangunan desa antara tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah berkurangnya jumlah desa terbelakang dari 26% di tahun 2011 dan turun sehingga tersisa 20% di tahun 2019 dan menurunkan total desa tertinggal sampai lima ribu desa atau menaikkan total desa mandiri sekurang-kurangnya dua ribu desa (Kementerian Keuangan, 2017).

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Dana Desa adalah pertumbuhan ekonomi. Pada Buku Saku Dana Desa Kementerian Keuangan (2017), terdapat paparan-paparan mengenai evaluasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2015 dan 2016. Pemerintah mengklaim telah merampungkan 95,2 ribu Km jalan desa, 914 ribu meter jembatan, 22.616 unit sambungan air, 1.338 unit embung desa, 4.004 unit polindes, 3.106 unit pasar desa, 14.957 unit PAUD desa, 19.485 unit sumur, dan 103.405 unit drainase dan irigasi. Indikator kemiskinan di pedesaan juga menurun dari 14,09% penduduk miskin pada tahun 2015 berkurang menjadi 13,83% penduduk miskin pada tahun 2017 (Kementerian Keuangan, 2017). Penurunan penduduk miskin yang disebabkan oleh penurunan pengangguran. Hal ini karena penggunaan Dana Desa dapat menyerap lapangan pekerjaan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Harahap (2018) menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan di sepuluh kabupaten yang ada di Sumatera Utara adalah alokasi Dana Desa dan tenaga kerja. Sementara variabel indeks pembangunan manusia berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang cukup sempit dimana data hanya diambil dari sepuluh kabupaten saja.

Lumbantoruan dan Hidayat (2014) menemukan adanya afiliasi yang selaras antara Produk Domestik Regional Bruto dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi-provinsi di Indonesia dalam jangka panjang. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan tren IPM dan pertumbuhan ekonomi yang sama-sama menunjukkan tren positif antara 2004 sampai dengan 2011. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambah variabel Dana Desa sebagai penyempurnaan.

Badan Pusat Statistik juga mencatat tren IPM delapan tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan yang positif. IPM Indonesia pada tahun 2018 berada di angka 71,39 yang berarti Indeks Pembangunan Indonesia pada tahun 2018 memiliki peningkatan lebih dari setengah poin atau sebesar 0,82 persen jika dibandingkan dengan tahun 2017. Tren yang dimulai dari 2010 ini apabila kita cermati merupakan tren gabungan antara peningkatan IPM sebelum kebijakan Dana Desa dengan peningkatan IPM setelah pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Belanja daerah sendiri sebenarnya mempunyai dampak yang positif terhadap peningkatan IPM (Sunarni, 2017). Pada periode 2010 sampai dengan 2014, desa mendapatkan alokasi Dana Desa dari pemerintah daerah sedangkan dari 2015 sampai dengan 2018, jumlah dana yang diterima oleh desa bertambah seiring kebijakan Dana Desa yang berasal dari pemerintah pusat.

Selanjutnya, Bhinadi (2003) menemukan bahwa nilai pengaruh positif dari faktor produksi dan pertumbuhan kualitas SDM terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pulau Jawa lebih tinggi dibanding pada luar Pulau Jawa. Perbedaan nilai pengaruh positif yang terjadi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa menjadi menarik untuk dipelajari lebih lanjut dalam kaitannnya dengan Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto. Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian yang membagi Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa sebagai bahan pengambilan kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi daerah baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan baik oleh Dura (2016), Meutia & Liliana (2017), KOMPAK (2017), dan Sutiyono et al., (2018) belum mampu menarik kesimpulan terhadap hubungan Dana Desa secara nasional dan hubungannya dengan Produk Domestik Regional Bruto dengan menggunakan data empiris. Oleh sebab itu, perlu pengembangan penelitian yang terdahulu dengan objek yang lebih luas dan data yang lebih banyak yang meliputi seluruh kabupaten se-Indonesia guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan Dana Desa dengan Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia. Penambahan IPM sebagai variabel independen perlu diperhitungkan sebagai kemungkinan faktor-faktor selain Dana Desa yang juga memiliki pengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Daerah yang memiliki IPM tinggi diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibanding dengan daerah dengan IPM yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan arahan presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2018 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018. Presiden Joko Widodo menitikberatkan bahwa pembangunan manusia merupakan investasi untuk menghadapi masa depan demi melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Hal ini kembali ditegaskan saat menyampaikan pidato pertama usai pelantikan presiden periode 2019-2024 di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Selanjutnya, Ranis, et al. (2006) menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan kontributor dari stabilnya proses

pertumbuhan ekonomi dan tidak hanya berkontribusi terhadap tujuan fundamental pembangunan, tetapi juga sebagai faktor penting terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu.

Dari penelitian-penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa *research gap* yang meliputi *conceptual research gap, empirical research gap,* dan *methodological research gap*. *Conceptual research gap* ditemukan pada penelitian yang memanfaatkan Dana Desa yang bukan berasal dari APBN melainkan APBD yang memiliki konsep berbeda. Penelitian sebelumnya juga belum mampu menarik kesimpulan terhadap hubungan Dana Desa secara nasional dan hubungannya dengan Produk Domestik Regional Bruto dengan menggunakan data empiris. Penelitian Dura (2016) terbatas tanpa menggunakan laporan tahunan dari basis data primer ataupun data sekunder. Penelitian tersebut juga hanya menggunakan data responden. Sementara itu, penelitian Sutiyono, et al. (2018) lebih terfokus kepada hubungan Dana Desa dengan Produk Domestik Regional Bruto pada daerah perbatasan, yaitu Katingan dan Kotawaringin Timur di Kalimantan Tengah, dan Berau di Kalimantan Timur.

Empirical research gap ditemukan pada penelitian yang sebagian besar dilakukan di lingkup yang terbatas seperti desa, kecamatan, kabupaten, maupun provinsi tertentu. Sehingga antar penelitian dapat memiliki kesimpulan yang berbeda seperti hasil penelitian Dura (2016) dengan hasil penelitian (Meutia & Liliana , 2017). Objek penelitian yang spesifik ditemukan pada penelitian Dura (2016) dimana objek penelitiannya merupakan Desa Gubugklakah yang ada di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Penelitian (Dydha, 2017) juga dilakukan pada objek yang spesifik yaitu pada Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

Terakhir, penulis menemukan *methodological research gap* pada penggunaan variabel IPM yang belum pernah digunakan sebagai variabel independen dalam lingkup nasional yaitu seluruh kabupaten se-Indonesia. Penelitian Harahap (2018) menggunakan IPM sebagai variabel independen namun terbatas hanya pada sepuluh kabupaten di Sumatera Utara. Penelitian Lumbantoruan dan Hidayat (2014) menggunakan variabel independen IPM namun pada periode penelitian sebelum adanya kebijakan Dana Desa. Dari penelitian-penelitian terdahulu, penulis akan menggunakan variabel Dana Desa yang berasal dari APBN. Selanjutnya penulis memperluas objek penelitian dari objek yang terbatas menjadi objek penelitian yang lebih luas yaitu kabupaten se-Indonesia dengan objek penelitian berjumlah 429 kabupaten. Terakhir dari segi metodologi, penulis menambahkan IPM sebagai variabel independen dan Pembagian Wilayah sebagai variabel kontrol.

Berdasarkan persamaan pendapatan nasional, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan nasional. Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah tersebut adalah transfer Dana Desa yang merupakan kebijakan pemerintah sejak tahun 2015. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan kebijakan tersebut, untuk memastikan bahwa kebijakan penyaluran Dana Desa terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

1.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah Dana Desa memberikan pengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia dan untuk menguji apakah IPM memberikan pengaruh positif pada Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia dengan Pembagian Wilayah sebagai variabel kontrol.

2. LANDASAN TEORI

2.1. S*tewardship Theory*

Teori pertanggungjawaban atau dikenal dengan *stewardship theory* memaparkan ketika para manajemen tidak memiliki keinginan sesuai dengan tujuan pribadi namun justru termotivasi dengan kepentingan organisasi sebagai tujuan utamanya (Donaldson dan Davis, 1991). *Stewardship theory* menggambarkan bahwa manajemen dapat berperilaku baik demi kepentingan banyak pihak, sehingga tercipta koneksi yang kokoh antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Implikasi *stewardship theory* dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa sebagai organisasi publik, desa harus mampu bertanggungjawab atas apa yang sudah dipercayakan dan diamanahkan kepadanya.

Pemerintah pusat yang dalam penelitian ini berlaku sebagai *principals* mendelegasikan pengelolaan keuangan kepada pemerintah desa yang dalam penelitian ini bertindak sebagai *stewards* demi mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang lebih tepat sasaran sesuai dengan keunikan dan keberagaman masing-masing desa di Indonesia. Hal ini akan berdampak terhadap tujuan akhir Dana Desa yaitu untuk memaksimalkan pencapainan penyejahteraan masyarakat desa. Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari baik tidaknya akuntabilitas kinerja (Mahsun, 2006).

2.2. Desa dan Dana Desa

Desa merupakan kumpulan orang di suatu tempat yang memilki asal usulan sama, memilki hak yang istimewa dan mempunyai susunan asli (Widjaja, 2012). Menurut Soenarjo dalam Nurcholis (2011), desa adalah kesatuan penduduk yang menetapi suatu tempat yang berlandaskan kepada adat dan hukum adat. Adat dan hukum adat tersebut tinggal pada tempat yang mempunyai batas-batas;

mempunyai kekuatan dalam ikatan lahir dan batin, baik dikarenakan satu keturunan maupun dikarenakan memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan yang sama; mempunyai susunan pengurus yang dipilih bersama; mempunyai kekayaan dengan besaran tertentu dan memiliki hak untuk menjalankan urusan rumah tangga sendiri. Pemerintahan Desa merupakan bentuk organisasi pemerintah yang melaksanakan kepentingan masyarakat.

Paradigma membangun dari pinggiran yang menjadi program pemerintah dimulai dari daerah-daerah tertinggal dan kawasan-kawasan perdesaan. Hal ini ditujukan untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah, antar desa, dan antar kota. Pemerintah percaya pada pembangunan yang berbasis perdesaan. Hal itu dirasa perlu untuk memperkuat dasar perekonomian, mempercepat pengentasan kemiskinan, serta mempercepat penurunan ketimpangan antar wilayah. Desa juga memiliki posisi yang strategis sebagai pusat untuk merubah tatanan sosial. Dalam hal ini pemerintah memicu keterkaitan pada prosedur belanja transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Semua kegiatan pemerintahan desa dalam kerangka otonomi desa merupakan kewenangaan desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa (Prasetyo dan Masdjojo, 2015).

Kementerian Keuangan (2017) dalam Buku Saku Dana Desa menyebutkan bahwa alokasi anggaran Dana Desa berasal dari Pemerintah Pusat dan dibagikan berdasarkan keadilan dan merata sesuai dengan landasan desa. Besaran alokasi anggaran yang ditujukan langsung ke desa dipatok 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah *(on top)* secara bertahap. Dana Desa ditentukan berdasarkan jumlah desa dan diperuntukan berdasarkan angka kemiskinan, jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis, dan luas wilayah. Setelah desa mengumpulkan seluruh penghasilannya dari berbagai sumber, maka desa perlu melakukan penatausahaan belanja dengan baik. Penatausahaan belanja yang baik membuat desa memiliki potensi dimasa yang akan datang terhadap penghasilan asli desa, baik yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun berasal dari pengelolaan aset terutama sewa. Pengelompokkan belanja dapat dilakukan berdasarkan bidang yang didanai.

2.3. Teori Pengeluaran Pemerintah

Semua aktivitas pemerintah perlu pembiayaan. Hal ini bersumber utamanya dari pendapatan pemerintah baik yang bersumber dari penerimaan teratur maupun penerimaan pembangunan (Suparmoko, 2011). Menurut Usmaliadanti (2011), pengeluaran pemerintah merupakan nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Pengeluaran pemerintah untuk barang publik dapat memberikan stimulasi pengeluaran untuk barang lain.

Keynes (1936) mengemukakan teori *Keynessian Revolution* (Revolusi Keynesian) yang termasuk dalam teori ekonomi makro. Teori ini berfokus terhadap pemintaan agregat yang efektif di dalam negeri. Permintaan agregat mampu mengatasi stagnasi faktor-faktor produksi sebagai variabel strategis. Permintaan agregat juga membangun pengeluaran untuk investasi, pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran untuk konsumsi yang efektif di dalam negeri. Hal tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi sehingga mengurangi pengangguran. Latar belakang Teori Keynes adalah terjadinya depresi yang sangat besar pada tahun 1929/1930. Teori Keynes sangat relevan untuk tujuan pemantapan jangka pendek namun dalam pembangunan tidak mampu memecahkan persoalan jangka panjang (Arif, 1998).

Berdasarkan ilmu ekonomi, perhitungan pendapatan nasional dihitung dengan menggunakan formula $Y = C + I + G + X - M$.
Keterangan:
Y = Pendapatan nasional
C = Consumption (konsumsi rumah tangga)
I = Investment (investasi)
G = Government Expenditure (pengeluaranpemerintah)
X = ekspor
M = impor

Formula ini merupakan konsep pendapatan nasional, Y merupakan pendapatan nasional. Variabel tersebut juga merefleksikan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan merupakan permintaan agregat. Variabel G merupakan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya nilai G terhadap Y diamati dari waktu ke waktu untuk mendapatkan hubungan pengeluaran pemerintah dalam perumusan pendapatan nasional (Dumairy, 1996). Dana Desa sendiri masuk dalam kategori G yang berada di ruas kanan.

2.4. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan pengukuran perbandingan dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak keseluruhan negara (UNDP, 1997). IPM berfungsi untuk mengetahui besaran pengaruh yang dapat timbul dari usaha untuk memajukan kemampuan sumber daya manusia. Melalui pemberdayaan penduduk, unsur

pembangunan manusia berfokus pada peningkatan dasar manusia. Perhitungan pembangunan dilakukan dengan mengukur ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Semakin tinggi hasil perhitungan menunjukkan semakin berhasil tujuan pembangunan. Pembangunan adalah cara perubahan menuju perbaikan (Baeti, 2013).

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyaknya tahun selama hidup yang dapat ditempuh oleh seseorang. Angka harapan hidup dihitung dengan metode tidak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan untuk menghitung angka harapan hidup adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Untuk menghitung angka harapan hidup, paket program Mortpark digunakan berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, metode Trussel dipilih dengan model West. Hal ini karena metode tersebut cocok dengan keadaan penduduk di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2015). nilai maksimum dan nilai minimum dihitung untuk menentukan indeks harapan hidup sesuai standar *United Nations Development Programme* (UNDP), yaitu dengan menggunakan angka angka 85 sebagai nilai tertinggi atau batas atas dan angka 25 sebagai nilai terendah atau batas bawah.

Komponen pembentuk IPM lainnya berasal dari dimensi pengetahuan. Dimensi ini diukur melalui tingkat pendidikan. Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah digunakan sebagai indikator penentu. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masing-masing memiliki bobot satu perdua, selanjutnya penggabungan kedua indikator ini diperuntukkan sebagai indeks pendidikan yang menjadi salah satu unsur pembentuk IPM. Untuk penduduk usia 25 tahun keatas, rata-rata lama sekolah mendeskripsikan banyaknya tahun yang digunakan untuk mengikuti pendidikan formal. Perhitungan rata-rata lama sekolah memakai dua tolok ukur yang digunakan sesuai standar yang diakui oleh beberapa negara. Batasan maksimum untuk rata-rata lama sekolah yaitu 15 tahun dan batas minimumnya yaitu 0 tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan durasi sekolah (dalam tahun) yang diprediksikan ditempuh oleh anak pada umur tertentu di masa datang. Peluang anak tersebut tetap dapat menempuh pendidikan di kemudian hari diasumsikan sama dengan peluang penduduk yang menempuh pendidikan per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Perhitungan Angka Harapan Lama Sekolah dilakukan kepada penduduk berusia 7 tahun ke atas. Tujuan perhitungan HLS adalah untuk mendapatkan keadaan pembangunan sistem pendidikan di beragam tingkat. Hal ini didefinisikan dalam bentuk waktu pendidikan (dalam tahun) yang dipresiksi dapat dicapai oleh setiap individu.

Terakhir, standar hidup layak menjadi dimensi terakhir dari perhitungan kualitas hidup manusia. Standar hidup layak berfokus pada tingkat kesejahteraan yang didapatkan oleh penduduk sebagai akibat dari kemajuan ekonomi. UNDP menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan untuk mengukur standar hidup layak. Pengeluaran tersebut didapatkan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purcashing Power Parity-PPP*). Pengeluaran rata-rata per kapita dalam kurun waktu satu tahun didapatkan dari Susenas, ditentukan berdasarkan tingkat provinsi hingga tingkat kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dijadikan konstan/riil dengan tahun dasar 2012 = 100. Formulasi paritas daya beli menggunakan metode baru adalah dengan perhitungan menggunakan 96 komoditas. Dari 96 komoditas tersebut, 66 komoditas diantaranya merupakan makanan dan 30 komoditas lainnya merupakan nonmakanan. Metode Rao digunakan sebagai metore penghitungan paritas daya beli.

2.5. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono (2010), meningkatnya produksi barang dan jasa pada suatu negara diakibatkan dari pembangunan di semua hal, infrastruktur, jumlah sekolah, barang modal, dan lain-lain yang menandakan bahwa suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perbedaan kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat apabila terdapat peningkatan jumlah barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi bukan merupakan kondisi ekonomi pada tahun tertentu melainkan suatu proses yang berkelanjutan. Perekonomian dilihat sebagai perubahan sesuatu antar waktu atau berkembang. Penekanan perekonomian terjadi pada perubahan atau perkembangannya (Boediono, 2018). Untuk mempermudah proses pengolahan data, penulis menggunakan data PDRB dimana data tersebut merupakan data mentah untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Data Dana Desa yang berupa nominal ratusan juta akan lebih memberikan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan data nominal rupiah bukan persentase.

Dalam kehidupan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasi kesuksesan dalam membangun perekonomian. Adalah penting untuk menghitung pertumbuhan ekonomi di mana salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan mendapatkan perhitungan detail mengenai nilai uang. Nilai uang dapat direfleksikan pada produk domestik bruto (PDB). Mankiw (2014)

mengungkapkan bahwa PDB adalah ukuran yang kerap digunakan untuk dapat menentukan tingkat kemajuan ekonomi. PDB digunakan untuk melihat efektivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu dalam periode waktu tertentu.

Sementara untuk mengukur ekonomi suatu daerah digunakan PDRB. PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan), penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Jadi, dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tertentu, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pert. Ekonomi Regional} = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:
$PDRB_t$ = PDRB tahun t
$PDRB_{t-1}$ = PDRB tahun sebelumnya

Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan usaha di suatu daerah pada periode tertentu (Bank Indonesia, 2012).

2.6. Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian yang dijadikan rujukan antara lain berasal dari penelitian yang dilakukan oleh (Chandoevwit dan Ashakul, 2008). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa program *village fund* tidak berdampak pada pendapatan rumah tangga pedesaan, kecuali pendapatan rumah tangga pada wilayah pusat, dimana *village fund* telah meningkatkan pendapatan pertanian per kapita di wilayah tersebut sebesar 55 persen.

Berbanding terbalik dengan penelitian di atas, penelitian Sari dan Abdullah (2017) yang mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa variabel Dana Desa memiliki dampak yang besar terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung. Dana Desa dan alokasi Dana Desa efektif dan berhasil mengurangi kemiskinan desa pada 13 desa di Kabupaten Tulungagung.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Tim Kajian Pusat Kebijakan APBN (2017) menunjukkan bahwa Dana Desa yang dialokasikan pada tahun 2015-2017 telah meningkatkan perekonomian desa. Dimulai pada tahun 2015, Dana Desa telah membawa dampak yang positif, seperti menurunnya tingkat kemiskinan dari 14,2 persen (tahun 2015) menjadi 13,9 persen (tahun 2017). Perubahan positif juga dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin yang turun dari 17,94 juta jiwa (tahun 2015) menjadi 17,10 juta jiwa (tahun 2017). Gini rasio pedesaan juga mengalami perbaikan yang turun dari 0,334 pada 2015 dan menjadi 0,320 di tahun 2017.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Lumbantoruan dan Hidayat, Eka Hidayat, dan Paidi pada 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara IPM dengan PDRB. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang terdapat hubungan yang seimbang antara PDRB dan IPM provinsi-provinsi di Indonesia (Lumbantoruan dan Hidayat, 2014).

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) pada tahun 2017 yang bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berjudul "*Village Fund and Proverty Alleviation*", menyimpulkan bahwa pada tahun 2016 terdapat ketimpangan antar kabupaten pada formula pengalokasian Dana Desa. Mereka melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa proses *bottom-up* dalam mengakses Dana Desa, dan meningkatkan alokasi dana, dapat menyediakan lebih banyak sumber daya dan meningkatkan implementasi Dana Desa menuju penggunaan lahan berkelanjutan serta terdapat peluang optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan ekonomi pedesaan, mengurangi deforestasi, dan mengelola penggunaan lahan secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan penggunaan lahan dan pertumbuhan ekonomi (Sutiyono et al., 2018).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang diolah menggunakan regresi linear data panel. Penulis menggunakan data populasi kabupaten se-Indonesia. Jumlah populasi yang digunakan sebanyak 1.716 data. Data tersebut berupa pertumbuhan ekonomi per kabupaten se-Indonesia, Dana Desa yang berasal dari APBN yang dialokasikan pada kabupaten se-Indonesia, IPM per kabupaten se-Indonesia, serta Pembagian Wilayah Jawa dan Non Jawa pada kabupaten-kabupaten di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2018.

Indonesian Treasury Review Vol.6, No.4, (2021), Hal 375-391.

3.1. Pengembangan Hipotesis

Dura (2016) menyatakan bahwa alokasi dana, kebijakan, serta kelembagaan desa memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dydha (2017) juga mengemukakan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan infrastruktur desa dan terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa berperan sebagai tambahan dana pembangunan infrastruktur, peningkatan usaha kecil menengah, pengelolaan bank sampah, dan pelatihan usaha ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh KOMPAK dan Bappenas (2017) yang berjudul "*Village Fund and Proverty Alleviation*" menunjukkan bahwa terdapat pendistribusian dana yang tidak merata antar kabupaten pada formula pengalokasian Dana Desa tahun 2016. Meutia & Liliana (2017) juga menemukan adanya pelaksanaan pembangunan di pedesaan yang tidak merata sehingga dalam pembangunan tidak ada *multiplier effect* yang didapat oleh masyarakat desa.

Dana Desa bertujuan antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, hingga meningkatkan produktivitas usaha. Saat ini Dana Desa yang semakin meningkat diutamakan untuk ekspansi infrastruktur dan penguatan masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan adalah:

H_1 = Terdapat pengaruh positif yang lebih tinggi Dana Desa terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa dibanding dengan kabupaten-kabupaten di luar Pulau Jawa.

Menurut Mankiw et al. (2014) modal dapat dilihat dari kemampuan dan pengetahuan yang diterima semua orang yang didapatkan dari pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pelatihan dalam pekerjaan (*on the job training*). Modal ini mengoptimalkan produksi barang dan jasa yang nantinya akan ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian, penelitian Lumbantoruan dan Hidayat (2014) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan IPM provinsi-provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa IPM akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Indek pembangunan manusia menunjukkan kualitas sumber daya manusia dari suatu daerah pada tahun tertentu dan sumber daya manusia merupakan sumber penopang Produk Domestik Regional Bruto yang cukup material. Manusia-manusia yang handal membuat perekonomian semakin maju berkat produktivitasnya yang membuat pembangunan menjadi lebih efisien dan efektif. Pertumbuhan ekonomi secara agregat juga dapat dihasilkan dari manusia yang berkualitas (Tjiptoherijanto, 1996). SDM yang baik mampu menghasilkan produk dan jasa dalam jumlah yang besar. Ranis et al. (2006) menyatakan bahwa pembangunan manusia berkontribusi terhadap proses stabilisasi pertumbuhan ekonomi, terhadap tujuan fundamental pembangunan, serta terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang dapat dibangun adalah:

H_2 = Terdapat pengaruh positif yang lebih tinggi IPM terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa dibanding dengan kabupaten-kabupaten di luar Pulau Jawa.

3.2. Data dan Variabel

Data yang dipakai pada penelitian ini merupakan data sekunder. Data diambil dari APBN selama periode tahun 2015–2018. Data berupa Dana Desa diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sedangkan data Indeks Pembangunan Manusia, Pembagian Wilayah, dan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari website Badan Pusat Statistik.

Penelitian ini menggunakan variabel dependen data Produk Domestik Regional Bruto kabupaten se-Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2018. Variabel Independen dalam penelitian ini merupakan data Dana Desa dalam bentuk alokasi per kabupaten se-Indonesia dalam rentang waktu 2015 sampai dengan 2018 serta IPM kabupaten se-Indonesia dalam periode tahun 2015 sampai dengan 2018. Variabel Kontrol dalam penelitian ini merupakan data pembagian wilayah Jawa dan Non Jawa pada kabupaten-kabupaten di Indonesia dalam rentang waktu 2015 sampai dengan 2018.

3.3. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah:

$$PE\,it = \alpha + \beta 1DD\,it + \beta 2IPM\,it + \beta 3J\,it + e$$

Keterangan:
PE = Produk Domestik Regional Bruto
DD = Dana Desa
IPM = Indeks Pembangunan Manusia
J = Kabupaten-Kabupaten di Pulau Jawa
α = konstanta
β = koefisien
e = *error*
i = data kabupaten
t = data tahun

3.4. Metode Pengolahan Data

Penulis melakukan estimasi model regresi yang akan digunakan. Tiga model pada data panel yaitu *Common Effect Model* (*CEM*), *Fixed Effect Model* (*FEM*), dan *Random Effect Model* (*REM*). Metode pengolahan data yang dilakukan menggunakan regresi linear. Analisis regresi linear ialah estimasi atas besaran koefisien-koefisien hasil penelitian. Persamaan ini melibatkan dua variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi besarnya nilai variabel terikat (Jonathan, 2006).

CEM menyatukan data *cross section* dengan *time series* dan menggunakan metode *ordinary least square* sebagai estimasi pemodelan data panel tersebut (Widarjono, 2007). Dibanding model lain, model ini adalah model yang paling sederhana. Tidak ada perbedaan pada *CEM* antara silang tempat dan titik waktu dikarenakan memiliki *intercept* yang tetap, dan tidak memiliki variasi random (Kuncoro dan Ridwan, 2012). Bentuk persamaan untuk model *CEM* mendefinisikan i sebagai subjek (*cross section*) dan t sebagai periode waktu (Gujarati dan Porter, 2012). Pada model ini, asumsi perilaku data adalah sama untuk kurun waktu yang berbeda (Widarjono, 2007). *FEM* merupakan model yang memiliki *intercept* beragam untuk setiap subjek (*cross section*), namun *slope* untuk setiap subjek adalah sama untuk kurun waktu yang berbeda (Gujarati dan Porter, 2012). Asumsi yang dibangun pada model ini adalah *intercept* setiap subjek adalah berbeda sementara *slope* setiap subjek adalah tetap. Cara yang digunakan untuk membedakan subjek-subjek yang ada adalah menggunakan variabel dummy (Kuncoro dan Ridwan, 2012). Model ini juga dikenali sebagai model *Least Square Dummy Variables* (*LSDV*). Berdasarkan Gujarati dan Porter (2012) variabel *dummy* pada persamaan model ini disimbolkan d_{1t} untuk subjek pertama dan 0 jika bukan, d_{2t} untuk subjek kedua dan 0 jika bukan, dan seterusnya.

Apabila sebuah penelitian memiliki 12 data *cross section*, maka banyaknya variabel *dummy* adalah 11 variabel. Hal ini dimaksudkan untuk terhindar dari perangkap variabel dummy. Perangkap variabel dummy merupakan keadaan saat terjadi kolinearitas sempurna (Gujarati dan Porter, 2012). Intercept b_0 adalah nilai intercept subjek pertama sedangkan koefisien b_6 , b_7 , b_8 menandakan besar perbedaan intercept subjek lain terhadap subjek pertama.

REM merupakan model yang memiliki asumsi variasi dalam nilai dan arah hubungan antar subjek. Variasi ini berbentuk residual (Kuncoro dan Ridwan, 2012). Estimasi data panel pada *REM* berfokus pada variabel residual yang diprediksi berhubungan antar waktu dan subjek. Menurut Widarjono (2007), *REM* mampu menyelesaikan kelemahan yang dimiliki oleh *FEM* yang berupa penggunaan variabel dummy. Metode analisis data panel menggunakan model ini memiliki persyaratan dimana jumlah *cross section* harus lebih besar dibanding jumlah variabel penelitian. Persamaan ini menurut Gujarati dan Porter (2012) adalah dimana w_{it} dibentuk dari dua komponen yaitu ei (*residual cross section*) dan m (residual gabungan *time series* dan *cross section*). Karena residual terdiri atas dua komponen, model ini dikenal sebagai *Error Components Model* (ECM). Untuk memilih di antara ketiga model tersebut, penulis melakukan beberapa pengujian antara lain uji Chow, uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Pengujian tersebut dilakukan terhadap data panel untuk menggunakan model data panel yang memungkinkan untuk memberikan hasil pengujian terbaik.

Selanjutnya penulis melakukan uji asumsi klasik. Asumsi klasik diuji untuk mendapatkan persamaan regresi yang memiliki estimasi pemodelan yang tepat, tidak bias, dan konsisten. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas, bertujuan untuk mengetahui normalitas distribusi dari nilai residual. Nilai residual pada model regresi sebaiknya terdistribusi normal. Jadi fokus dari uji normalitas adalah pada nilai residualnya, bukan masing-masig variabel. Kesalahan yang sering terjadi yaitu ketika uji normalitas diterapkan untuk setiap variabel. Hal ini tidak dilarang hanya saja pengujian yang diterapkan untuk setiap variabel tidaklah diperlukan.

b. Uji Multikolinearitas, bertujuan untuk mengetahui tingkat korelasi dalam model regresi. Jika korelasi antar variabel independen dinilai tinggi atau sempurna, maka terdapat gejala multikolinearitas pada model regresi (Ghozali dan Ratmono, 2017). Model regresi sebaiknya tidak mengalami korelasi pada variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas, dimaksudkan untuk menguji ada tidaknya ketidaksamaan varians dari residual antar pengamatan pada model regresi (Ghozali dan Ratmono, 2017). Homoskedastisitas terjadi jika varians dari residual antar pengamatan bernilai sama. Sebaiknya regresi terbebas dari gejala ini.

d. Uji Autokorelasi, dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t periode t-1 (sebelumnya) yang terdapat pada model regresi linear (Ghozali dan Ratmono, 2017).

Tahapan terakhir adalah melakukan uji koefisien determinasi (R^2 dan *Adjusted R^2*), uji signifikansi simultan (uji statistik F), dan uji statistik individual (uji statistik t).

a. Koefisien Determinasi R^2

Nilai koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur besar keragaman yang dapat diterangkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali dan Ratmono, 2017). Besaran dari R^2 selalu bernilai positif dimana terletak antara angka nol hingga satu ($0 < R^2 < 1$). Jika R^2 mendekati satu atau satu, maka variabel dependen dapat dijelaskan dengan garis regresi

b. Uji F-statistik

Uji F-statistik dipakai dalam rangka mendapatkan pemahaman apakah variabel independen dalam model persamaan yang digunakan secara bersamaan signifikan memengaruhi variabel dependen (Ghozali dan Ratmono, 2017). Nilai F-statistik yang besar merupakan nilai yang lebih baik dibandingkan F-statistik yang bernilai rendah. Nilai Prob (F statistik) adalah taraf signifikasi marginal dari F-statistik. Berikut merupakan hipotesis pada uji F-statistik:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = ... = \beta_i = 0$

H_1 : minimal ada salah satu $\beta i \neq 0$

Jika nilai Prob (F-statistik) lebih kecil dari nilai taraf nyata (α) maka dapat dikatakan tolak H_0, dimana dengan tingkat keyakinan 1-α dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang dipakai dalam model secara bersamaan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

c. Uji t-statistik

Uji t-statistik dipakai untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali dan Ratmono, 2017). Pada uji ini, variabel kontrol berperan sebagai penghilang bias. Pengujian ini dilakukan untuk melihat secara statistik sifat signnifikan atau tidak dari koefisien masing-masing variabel dalam model. Berikut merupakan hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini:

$H_0 : \beta_1 = 0$, i = 1, 2, 3, ..., k.

$H_1 : \beta_i \neq \beta_0$

Jika t-hitung < $t\alpha$ / 2(n-k), maka tolak H_0 dan jika t-hitung > $t\alpha$ / 2(n-k), maka terima H_0 dimana $t\alpha$ / 2(n-k) merupakan nilai t-tabel. Jika hipotesis H_0 ditolak maka dalam kriteria uji-t variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen begitu pula dengan sebaliknya jika hipotesis H_0 diterima maka variabel independen tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai t-hitung, semakin kuat pula bukti bahwa variabel tersebut signifikan secara statistik.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Analisis Deskriptif dan Hasil Regresi

Berdasarkan hasil pengolahan masing-masing variabel penelitian, penulis memperoleh karakteristik atau gambaran data penelitian. Data yang diolah adalah data hasil logaritma natural untuk data PDRB dan Dana Desa. *Log natural* digunakan karena data Dana Desa dan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan data PDRB memiliki satuan rupiah di mana antar setiap data pada variabel tersebut memiliki selisih cukup besar.

Sementara itu, data IPM tidak ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural. IPM memiliki satuan nilai antara 0 sampai dengan 100 dan tidak ada selisih yang signifikan antar data IPM yang digunakan dalam penelitian ini. Transformasi ini juga membuat nilai koefisien yang didapat menjadi semakin kecil. Hal ini disebabkan perbedaan yang terjadi antar satuan nilai antar variabel yang sangat besar.

Data pembagian wilayah mengacu pada pembagian Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Nilai satu dimasukkan sebagai nilai variabel kontrol untuk kabupaten-kabupaten yang terletak di Pulau Jawa dan nilai nol dimasukkan sebagai nilai variabel kontrol untuk kabupaten-kabupaten di luar Pulau Jawa. Deskripsi statistik dari variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Statistik Deskripsi Variabel Penelitian Jawa

	PE	DD	IPM	JAWA
Mean	12954.36	108.7303	66.30292	0.191142
Median	6589.500	87.00888	66.88000	0.000000
Maximum	159187.0	635.3144	84.37000	1.000000
Minimum	113.0000	4.572649	25.47000	0.000000
Std.Dev.	18955.19	81.78759	5.904947	0.393315
Obs.	1716	1716	1716	1716

Sumber: Diolah www.bps.go.id

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh PDRB adalah 12954.36 triliun, nilai mediannya adalah 6589,5 triliun, dan standar deviasinya adalah 18955,19 triliun.

Sedangkan untuk Dana Desa, rata-ratanya adalah 108,7303 triliun, mediannya adalah 87,00888 triliun, dan standar deviasinya adalah 81,78759 triliun. Rata-rata IPM adalah 66,30292, median IPM adalah 66,88000, dan standar deviasinya adalah 5,904947. Rata-rata Jawa adalah 0.191142 yang menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa memiliki porsi 19,1142% dari jumlah total kabupaten di Indonesia.

Dalam proses selanjutnya, data pertumbuhan ekonomi dan Dana Desa di transformasi menjadi logaritma normal atau LN sedangkan IPM dan Tingkat Kemiskinan tetap menggunakan data aslinya. Ada lima data yang dieliminasi dari penelitian ini karena data IPM dari kabupaten dimaksud belum dipublikasikan sampai dengan penelitian ini dilakukan. Lima Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Mempawah, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Bulungan.

Tabel 3 Hasil Analisis Model Terpilih Jawa

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.427395	0.358273	12.35761	0.0000
LN_DD	0.042436	0.008964	4.734005	0.0000
IPM	0.059278	0.006235	9.507512	0.0000
JAWA	1.271152	0.071669	17.73641	0.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.446321	Mean dependent var		0.417338
Adjusted R-squared	0.445350	S.D. dependent var		0.102480
S.E. of regression	0.076321	Sum squared resid		9.972348
F-statistic	460.0141	Durbin-Watson stat		1.221949
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Diolah dari *eviews10*

Tabel 4 Hasil Analisis Model Terpilih Non Jawa

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.698547	0.392552	14.51666	0.0000
LN_DD	0.042436	0.008964	4.734005	0.0000
IPM	0.059278	0.006235	9.507512	0.0000
NON_JAWA	-1.271152	0.071669	-17.73641	0.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.446321	Mean dependent var		0.417338
Adjusted R-squared	0.445350	S.D. dependent var		0.102480
S.E. of regression	0.076321	Sum squared resid		9.972348
F-statistic	460.0141	Durbin-Watson stat		1.221949
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Diolah dari *eviews10*

Hasil dari pemilihan model regresi dengan menggunakan Chow Test, Langrange Multiplier Test, dan Hausman Test disimpulkan bahwa model regresi yang cocok adalah *Fixed Effect Model (FEM).* Namun begitu, berdasarkan kesimpulan uji asumsi klasik, terdapat masalah pelanggaran asumsi autokorelasi serta gejala heterodeskedastisitas. Penggunaan model regresi dengan pendekatan *Ordinary Least Squares (OLS)* sebenarnya masih dapat memberikan hasil yang konsisten, namun begitu penggunaan pendekatan *Ordinary Least Squares* tidak lagi optimal. Penggunaan *FEM* juga tidak mampu memberikan hasil optimal ketika data memiliki masalah heteroskedastisitas, autokolerasi, serta ketergantungan antar *cross sectional*. *Solusinya* adalah menggunakan *Random Effect Model (REM)* dengan perhitungan *General Least Square (Cross Section Weight*). Walaupun hasil uji hausman menunjukkan bahwa *FEM* lebih baik daripada *REM*, namun begitu mendasarkan pilihan model regresi hanya pada hasil uji hausman sebagai dasar tunggal dari keputusan metodologis utama seorang peneliti adalah tidak memadai (Clark dan Linzer, 2015).

General Least Square (Cross Section Weight) adalah pendekatan model data panel yang dapat mengatasi data yang memiliki gejala heteroskedastisitas dan autokorelasi (Moundigbaye, 2018). Pendekatan *REM* tidak memerlukan uji asumsi klasik yaitu uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi (Gujarati dan Porter, 2012).

Namun begitu, pendekatan dengan *General Least Square (Cross Section Weight*) memiliki dua kendala untuk diterapkan pada data dengan jumlah *time series* (t) lebih banyak daripada jumlah *cross section* (n) dari data tersebut. Pada penelitian ini, jumlah data *time series* (t) yang berjumlah 4 tahun jauh lebih kecil dibanding jumlah data *cross section* (n) yang mana pada penelitian ini berjumlah 429.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Beck dan Katz (1995) menyarankan estimasi model linear data dengan menggunakan *estimator* atau penaksir tipe *sandwich* dari matriks kovarians dari estimasi parameter, yang mereka sebut *Panel-Corrected Standard Errors* (*PCSE*), yang kuat untuk kemungkinan data panel diimplementasikan dalam fungsi yang memiliki gejala autokorelasi berupa *serial correlation* dan *cross-sectional dependence*, serta gejala heteroskedastisitas walaupun jumlah n lebih besar dari jumlah t. Oleh karena itu, penulis menggunakan *General Least Square (Cross Section Weight*), dengan koefisien estimasi *Panel-Corrected Standard Errors* (PCSE). Hasil dari regresi model untuk pengaruh Dana Desa dan IPM terhadap

pertumbuhan ekonomi kabupaten dengan metode regresi *FGLS* dengan koefisien estimasi *PCSE* ditunjukkan pada Tabel 3 dan 4.

4.2. Analisis Pengaruh Dana Desa terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Berdasarkan tabel 3 dan 4 dapat disimpulkan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh positif baik di Jawa maupun Luar Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut mendukung hasil penelitian Tim Kajian Pusat Kebijakan APBN (2017) yang berjudul "Manfaat Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan Desa". Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Kajian Pusat Kebijakan APBN (2017) menunjukkan bahwa Dana Desa yang dialokasikan selama 2015-2017 telah menghasilkan output pengembangan perekonomian desa yang positif.

Hasil ini juga sesuai dengan teori pengeluaran pemerintah dari Keynes. Menurut teori Keynes, pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Teori Keynes menitikberatkan pemintaan agregat di dalam negeri yang efektif sebagai variabel strategis. Permintaan agregat yang efektif berguna untuk menyelesaikan masalah stagnasi faktor-faktor produksi. Variabel Dana Desa mampu mendorong peningkatan parmintaan agregat sedangkan IPM membuat penggunaan Dana Desa menjadi lebih efektif. Pada akhirnya pengelolaan Dana Desa yang baik membuat faktor-faktor produksi dapat beoperasi dengan optimal. Selanjutnya, konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah yang memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi dapat dibentuk oleh permintaan agregat yang efektif di dalam negeri sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dana Desa, yaitu bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan untuk kebutuhan desa sebaiknya dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan. Ini artinya, pekerja dapat berasal dari masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat desa yang akhirnya dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto.

Di sisi lain, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Chandoevwit dan Ashakul (2008) yang menunjukkan bahwa program *village fund* tidak berdampak terhadap pendapatan rumah tangga pedesaan. Pendapatan yang diterima oleh suatu masyarakat menjadi dasar ukuran kemakmuran suatu wilayah dalam hal ini wilayah pedesaan, karena pendapatan masyarakat dapat membiayai kebutuhan hidup masyarakat tersebut. Pendapatan tercipta akibat adanya aktivitas produksi, yang selanjutnya pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai konsumsi. Proses mencari angka PDRB merupakan upaya untuk menentukan angka pasti berapa besaran pendapatan penduduk di suatu tempat. Apabila stimulus berupa *village fund* ternyata tidak berdampak terhadap pendapatan rumah tangga pedesaan, maka hal ini berarti *village fund* juga tidak berdampak terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Metode yang disebut program padat karya dengan skema *cash for work* diharapkan dapat mengurangi pengangguran yang ada di sebuah desa. Program ini mampu meningkatkan perekonomian desa dengan meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui pembayaran upah langsung. Prinsip ini membuat Dana Desa berputar secara internal di desa itu sendiri, sehingga pada akhirnya memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat desa (Kementerian Keuangan, 2017).

Hasil penelitian pada variabel Dana Desa telah sesuai dengan teori makro ekonomi dan hipotesis yang telah dibangun. Namun begitu, jumlah koefisien Dana Desa yang cukup kecil di angka 4,24% menunjukkan bahwa pengaruh positif dari Dana Desa belum cukup untuk memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh pengelolaan Dana Desa yang tidak mengikuti aturan yang ada, yang dapat mengarah kepada korupsi di dalam penggunaan Dana Desa. Sampai saat ini, belum semua desa membuat laporan pertanggungjawaban Dana Desa begitu pun di tingkat kabupaten. Belum adanya laporan pertanggungjawaban Dana Desa ini dapat dilihat dari laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak memuat laporan realisasi anggaran Dana Desa.

Dokumen yang dipublikasi oleh pemerintah desa juga masih merupakan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tahun berjalan dimana hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa belum menyampaikan anggaran/APBDes dan realisasi/ pertanggungjawaban. Apabila melihat prosedur pertanggunggjawaban Dana Desa, laporan pertanggungjawaban Dana Desa harus dibuat dan disampaikan satu bulan setelah akhir tahun anggaran selesai kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain. Padahal, laporan pertanggungjawaban Dana Desa sangat penting dan perlu dibuat guna kebutuhan evaluasi dan perbaikan pengelolaan Dana Desa ke depannya. Betan dan Nugroho (2021) menemukan bahwa proses pencatatan Lembar Pertanggungjawaban Dana Desa berbentuk dokumen manual (bukan

komputerisasi) sehingga berpotensi terjadi kesalahan atau potensi besar untuk merubah angka pengeluaran.

Penyebab selanjutnya bisa saja dari kebijakan Dana Desa yang masih belum terasa dampaknya karena merupakan kebijakan yang relatif baru. Jumlah anggaran Dana Desa pada dua tahun pertama penyelenggaraan Dana Desa juga masih cukup kecil dibanding jumlah Dana Desa di tahun 2017 dan 2018 yang sudah mulai menunjukkan tren yang stabil (Kementerian Keuangan, 2017). Untuk lebih merasakan dampak positif dari kebijakan Dana Desa yang berkelanjutan, peneliti meyakini bahwa masyarakat perlu menunggu lebih lama untuk mendapatkan akumulasi dari realisasi-realisasi kebijakan Dana Desa dari tahun-tahun sebelumnya.

Terakhir, masih maraknya kasus korupsi dan penyalahgunaan penggunaan Dana Desa yang membuat penggunaan Dana Desa menjadi kurang tepat sasaran. Hasil penelitian Herdiana (2019) menunjukan bahwa perilaku koruptif kepala desa disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: Pertama, faktor regulasi yang mana UU Desa memberikan kewenangan pembangunan yang besar kepada pemerintah desa, sehingga posisi kepala desa menjadi pemimpin sentral tingkat desa yang memonopoli pembangunan desa, ditambah dengan tidak adanya lembaga tingkat desa yang *face to face* menjadi penyeimbang dan kontrol terhadap kepala desa. Kedua, faktor pribadi kepala desa, seperti adanya desakan kebutuhan ekonomi, sifat tamak, rendahnya integritas dan moralitas, serta adanya tuntutan janji politik. Ketiga, faktor masyarakat, yang mana tidak adanya regulasi/mekanisme yang jelas bagaimana masyarakat melakukan pemantauan, serta indikator apa yang bisa dijadikan acuan oleh masyarakat untuk menilai kinerja kepala desa. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kontrol masyarakat terhadap kepala desa.

Korupsi tentu menjadi penghambat terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi. Ketiadaan investasi dan lesunya pertumbuhan ekonomi membuat produktifitas menurun. Seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi, hal ini menghambat perkembangan sektor industri untuk bisa berkembang lebih baik. Korupsi yang tinggi dan lemahnya koordinasi antar kebijakan serta birokrasi yang tidak efisien membuat kualitas institusi menjadi rendah sehingga menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi (Bappenas, 2019). Korupsi juga menyebabkan distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi sehingga menghambat pembangunan ekonomi. Selain itu, korupsi meningkatkan beban perusahaan dengan pembayaran ilegal, resiko pembatalan perjanjian karena penyelidikan, hingga uang suap untuk negosiasi dengan pejabat korup (Syahroni et al., 2018). Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Junaidi (2018) menyatakan bahwa korupsi secara langsung mempengaruhi dan memiliki korelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

4.3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Dari tabel 3 dan 4 dapat dilihat bahwa IPM berpengaruh positif baik di Jawa maupun Luar Jawa terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Hasil ini sesuai dengan penelitian Lumbantoruan dan Hidayat (2014) yang menyimpulkan bahwa antara terdapat hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan IPM provinsi-provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Tim Kajian Pusat Kebijakan APBN, 2017). Penelitian yang menggunakan data sekunder dan primer dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan kuantitatif ini menunjukkan bahwa Dana Desa yang dialokasikan tahn 2015-2017 telah menunjukkan adanya pembangunan ekonomi desa. Hasilnya adalah adanya penurunan tingkat kemiskinan pedesaan dari 14,2% (tahun 2015) menjadi 13,9% (tahun 2017). Kemudian, dampak pada jumlah penduduk miskin pedesaan telah membantu penurunan pendudukan miskin dari 17,94 juta jiwa (tahun 2015) menjadi 17,10 juta jiwa (tahun 2017). selanjutnya, meningkatnya kualitas SDM juga menurunkan gini rasio pedesaan pada tahun 2015 sebesar 0,334 menjadi 0,320 di tahun 2017. Ketika kemiskinan turun, maka kualitas hidup manusia akan meningkat sejalan dengan itu IPM akan juga akan meningkat.

Di sisi lain, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil Harahap (2018) dimana variabel indeks pembangunan manusia di 10 kabupaten di Sumatera Utara berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil estimasi yang memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan dapat diartikan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia 10 kabupaten di Sumatera Utara belum merata dan cenderung menurun setiap tahun di beberapa Kabupaten di Sumatera Utara.

Indek pembangunan manusia menunjukkan kualitas sumber daya manusia dari suatu daerah pada tahun tertentu dan sumber daya manusia merupakan sumber penopang Produk Domestik Regional Bruto yang cukup material. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia akan membantu

meningkatkan produktifitas sehingga membuat kegiatan ekonomi menjadi lebih efisien yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara agregat (Tjiptoherijanto, 1996). Ranis et al. (2006) menyatakan bahwa pembangunan manusia berkontribusi terhadap proses stabilisasi pertumbuhan ekonomi, terhadap tujuan fundamental pembangunan, serta terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu.

Konsep pembangunan manusia seutuhnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik secara fisik, mental, maupun spritual. Bahkan disebutkan secara eksplisit bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan dilakukan dengan bertumpu kepada pembangunan sumber daya manusia. Manusia yang berkualitas juga lebih mudah diserap oleh pasar tenaga kerja yang pada akhirnya mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan. Manusia yang berkualitas dengan penghasilan tinggi lebih mudah untuk mencetak generasi penerus yang berkualitas dengan merawat, mendidik, dan menyekolahkan generasi penerusnya sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas dan pada akhirnya akan menjadi sebuah siklus yang terus berlanjut. Sebaliknya, IPM yang rendah menandakan masyarakat kesulitan dalam akses kepada pendidikan, kesehatan, serta memiliki daya beli yang rendah. Hal ini membuat masyarakat di suatu daerah dengan IPM yang rendah berpotensi besar untuk mewariskan kualitas sumber daya yang rendah ini kepada generasi penerusnya. Kesulitan membiayai sekolah, kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, dan kesulitan mencukupi kebutuhan pokok akan membentuk rantai kemiskinan yang berulang.

Maka dari itu, pemerintah harus hadir untuk meningkatkan pemerataan IPM untuk membantu daerah-daerah dengan IPM yang masih dibawah rata-rata. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengejar daerah lain dengan IPM yang tinggi guna mewujudkan tujuan pemerataan ekonomi di Indonesia, menurunkan ketimpangan, hingga menurunkan rasio gini nasional. Menurut Mankiw et al., (2014) kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pelatihan dalam pekerjaan (*on the job training*) yang diterima oleh para pekerja dewasa adalah modal. Modal ini mengoptimalkan produksi barang dan jasa.

Hal yang tak kalah penting adalah investasi dalam bentuk waktu belajar, guru, hingga perpustakaan sebagai upaya untuk meningkatkan modal tersebut. Langkah tepat di antaranya dapat berupa kampanye-kampanye pengiriman manusia-manusia unggul menuju daerah-daerah dengan IPM rendah dengan tujuan untuk membantu daerah tersebut untuk mencetak sumber daya manusia yang handal terutama melalui pendidikan dan kesehatan. Tenaga-tenaga pendidik dan kesehatan perlu dikirim ke daerah-daerah dengan IPM yang rendah sebagai bentuk pengabdian dan pelatihan bagi mereka terutama yang baru lulus kuliah untuk mendapatkan pengalaman lebih dalam mengangkat kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Sebagai gantinya, pemerintah perlu memberikan intensif baik berupa *privilege* untuk dapat menjadi pegawai negeri sipil, uang saku, maupun intensif lainnya yang dapat membuat para manusia-manusia handal di Indonesia mau untuk berbagi membantu sesamanya di daerah-daerah dengan IPM yang rendah.

4.4. Pengaruh Pembagian Wilayah Jawa dan Non Jawa Terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Berdasarkan tabel 3 dan 4 dapat disimpulkan bahwa Dana Desa dan IPM pada kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa memiliki pengaruh positif yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dibanging dengan kabupaten-kabupaten di luar Pulau Jawa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai positif 1.271152 pada variabel kontrol Jawa dan nilai negatif 1.271152 pada variabel kontrol non jawa.

Hasil analasis regresi yang ditampilkan pada tabel 3 memiliki nilai 1 pada kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa dan nilai 0 pada kabupaten-kabupaten di luar Pulau Jawa. Sebaliknya, hasil analisis regresi yang ditampilkan pada tabel 4 memiliki data bernilai 0 pada kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa dan nilai 1 pada kabupaten-kabupaten di luar Pulau Jawa.

Pengaruh positif yang lebih besar pada variabel-variabel independen yang diuji pada kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa didukung oleh beberapa fakta. Pertama, masih terjadi ketimpangan kualitas sumber daya manusia antara kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan rata-rata IPM Kabupaten-Kabupaten di Jawa dengan luar Jawa yang ditampilkan pada tabel 5. Gap yang mencapai lebih dari 5% ini tentunya membuat efektivitas penggunaan Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi regional juga terdampak. Ketika IPM berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, maka kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa yang memiliki rata-rata IPM yang lebih tinggi akan memberikan efektivitas penggunaan Dana Desa yang lebih tinggi pula. Hal ini menjadikan Dana Desa yang dikelola di kabupaten-kabupaten yang berada di Pulau Jawa memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang lebih besar dibanding kabupaten-kabupaten yang berada di luar Pulau Jawa.

Tabel 5 Perbandingan Rata-Rata IPM Kabupaten-Kabupaten di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa

Tahun	Jawa	Luar Jawa	Selisih
2015	67,78	64,24	3,54
2016	68,45	64,85	3,60
2017	69,07	65,45	3,62
2018	69,72	66,10	3,62

Sumber: Diolah dari *eviews10*

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan, terbukti bahwa Dana Desa memberikan pengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten di Indonesia pada tahun 2015-2018. Hasil ini telah sesuai dengan tujuan dibentuknya Dana Desa agar dapat meningatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Indonesia pada periode penelitian tahun 2015-2018. Pembangunan manusia dalam bentuk peningkatan kompetensi dan pengetahuan secara nyata memang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengasilkan barang dan jasa. Peningkatan output tersebut akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan PDRB.

Dalam rangka peningkatan kualitas manajemen pengeluaran pemerintah dari pemerintah pusat khususnya transfer Dana Desa, penulis menyarankan agar Pemerintah membuat standar pertanggungjawaban Dana Desa yang baik dengan konsep *e-government* guna memastikan bahwa Dana Desa digunakan oleh perangkat desa untuk kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian standar pertanggungjawaban yang telah dibuat diaplikasikan dan diawasi oleh berbagai pihak mulai dari inspektorat daerah hingga uji sampling oleh BPK.

Saran berikutnya, pemerintah daerah sebaiknya dapat melakukan pembinaan terhadap perangkat desa guna meningkatkan kualitas pengguna anggaran Dana Desa yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah di masing-masing kabupaten. perangkat desa sebagai pengguna Dana Desa juga perlu mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk meningaktkan kualitas SDM yang pada akhirnya mampu menaikkan tingkat IPM di daerah tersebut. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka penulis menyarankan agar pemerintah dapat menugaskan tenaga pendidik di daerah-daerah yang memiliki IPM yang tinggi di Pulau Jawa ke daerah-daerah dengan IPM yang lebih rendah di luar Pulau Jawa.

6. KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, periode penelitian tidak terlalu lama karena Dana Desa baru digulirkan secara efektif pada tahun 2015. Kedua, cakupan dan data terkait realisasi penggunaan Dana Desa yang digunakan seharusnya dari Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa. Namun, karena data tersebut belum tersedia, penelitian ini menggunakan data anggaran Dana Desa.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data realisasi Dana Desa dengan menggunakan periode waktu yang lebih panjang, serta menggunakan variabel independen yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, S. (1998a). *Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan*. CIDES.

Arif, S. (1998b). *Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan*. CIDES.

Badan Pusat Statistik. (2015). *Indeks Pembangunan Manusia*.

Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, *2*(3).

Bank Indonesia. (2012). *Produk Domestik Bruto (PDB)*.

Bappenas. (2019a). *Outlook Perekonomian Indonesia Pasca Pemilu Nasional*.

Bappenas. (2019b). *Outlook Perekonomian Indonesia Pasca Pemilu Nasional*.

Beck, N., & Katz, J. N. (1995). What To Do (and Not to Do) with Time-Series Cross-Section Data. *American Political Science Review*. https://doi.org/10.2307/2082979

Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, *Vol 5*(1).

Bhinadi, A. (2003). Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dengan Luar Jawa. *Economic Journal of Emerging Markets*.

Boediono, D. (2018). Teori Pertumbuhan Ekonomi. In *BPEF Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta* (Edisi Pert). Fakultas Ekonomikan & Bisnis UGM.

Chandoevwit, W., & Ashakul, B. (2008a). The Impact of the Village Fund on Rural Households. *10*

TDRI Quarterly Review. https://doi.org/10.1108/17561370910915357

Chandoevwit, W., & Ashakul, B. (2008b). The Impact of the Village Fund on Rural Households. *10 TDRI Quarterly Review*. https://doi.org/10.1108/17561370910915357

Clark, T. S., & Linzer, D. A. (2015). Should I Use Fixed or Random Effects? *Political Science Research and Methods*. https://doi.org/10.1017/psrm.2014.32

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*. https://doi.org/10.1177/031289629101600103

Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga.

Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang),. *Jurnal JIBEKA*.

Dydha, D. O. (2017). *Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dan Pemberdayaan Masyarkat Desa (Studi Pada Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik)*. Universitas Brawijaya.

Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D., & Porter, D. C. (2012). *Basic Econometrics* (Fifth Edit). McGraw Hill.

Harahap, N. (2018). *Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 10 Kabupaten di Sumatera Utara*.

Herdiana, D. (2019). Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Inovasi Kebijakan*.

Jonathan, S. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu.

Junaidi, I. K. P. (2018). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609

Kementerian Keuangan. (2017). *Buku Saku Dana Desa*.

Kementerian Keuangan. (2019). *Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, dan 2018 Menurut Kabupaten/Kota*.

Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment. Interest and Money*. Macmillan.

KOMPAK. (2017). *Village Fund and Proverty Alleviation*.

Kuncoro, E. A., & Ridwan. (2012). *Cara Mudah Menggunakan dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur)*. Alfabeta.

Lumbantoruan, E., & Hidayat, P. (2014). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi di Indonesia (Metode Kointegrasi). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*.

Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.

Mankiw, N. G., Q, E., & W, P. (2014). *Pengantar Ekonomi Makro*. Salemba Empat.

Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058

Moundigbaye, M., Rea, W. S., & Reed, W. R. (2018). Which panel data estimator should i use?: A corrigendum and extension. *Economics*. https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2018-4

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.

Prasetyo, Y., & Masdjojo, G. N. (2015). Implementasi kebijakan alokasi Dana Desa di 10 desa wilayah kecamatan rembang kabupaten rembang. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*.

Ranis, G., Stewart, F., & Samman, E. (2006). Human Development: Beyond the Human Development Index. *Journal of Human Development*. https://doi.org/10.1080/14649880600815917

Sadono, S. (2010). *Makroekonomi. Teori Pengantar* (Edisi Keti). PT Raja Grasindo Perseda.

Sari, I. M., & Abdullah, M. F. (2017). ANALISIS EKONOMI KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. https://doi.org/10.22219/jep.v15i1.4645

Sunarni. (2017). *Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota se-Indonesia*. Universitas Lampung.

Suparmoko, M. (2011). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.

Sutiyono, G., Rakhmadi, R., Muluk, S., & Mafira, T. (2018). Indonesia's Village Fund : An Important Lever for Better Land Use and Economic Growth at the Local Level. *A Climate Policy Initiative Report*. https://doi.org/Doi 10.1177/000992288302200202

Syahroni, Maharso, & Sujarwadi, T. (2018). *Korupsi, Budaya Bukan tetapi Penyakit*. Deepublish.

Tim Kajian Pusat Kebijakan APBN. (2017). *Manfaat Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan Desa*.

Tjiptoherijanto, P. (1996). *Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan Nasional*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

UNDP, B. P. S. (1997). *Indeks Pembangunan Manusia*.

Usmaliadanti, C. (2011). Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan terhadap Indeks

Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009. In *Journal of Economics Undip Repository*.

Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Ekonisia.

Widjaja, H. (2012). *Otonomi Desa*. PT Raja Grafindo Persada.